BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya segenap bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan Republik Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan beradab.

Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan dan keterampilan disiplin dan etos kerja serta tanggung jawab sesuai dengan ilmu dan teknologi agar mampu memperjuangkan kepentingan pekerja dan masyarakat pada umumnya. [1]

[1] Draft AD/ART FSPMI, Bandung, hal.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdirinya posko Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Berbek Industri ini yang bernama *Omah Perjuangan* menunjukkan masih adanya problematika di kalangan buruh. Problematika tersebut bukan datang dari pihak perusahaan saja, melainkan dari kebijakan pemerintah yang dirasa menyengsarakan kaum buruh. Mulai dari sistem outsourcing yang sangat terasa sekali perusahaan mengeksploitasi kaum buruh. Problematika kaum buruh di Indonesia Raya ini masih menjadi tugas dari bangsa kita. Salah satu media cetak terbitan FSPMI yang bernama *Koran Perjuangan* ini menerbitkan berita tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan. (KP, 30/10/2015)

> "Melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah menegaskan tidak akan mencabut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan). Menurut Pramono, PP Pengupahan tersebut sudah mengakomodir kepentingan pekerja maupun pengusaha. "Kami menyakini PP Pengupahan ini akan bisa diterima kedua belah pihak, bahwa sekarang ini masih ada demo karena pemerintah tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun, kami melihatnya PP ini justru memberi kepastian bagi pekerja maupun pengusaha," ujar Pramono. Lebih lanjut Pramono menjelaskan, kepastian tersebut terletak pada dimasukkannya komponen laju inflansi tahunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam formulasi perhitungan upah minimum untuk memperkuat hitungan kebutuhan hidup layak (KHL). "Pemerintah harus lebih cepat membuat keputusan, dan tidak akan mencabut PP Pengupahan ini," tegasnya. Tentu saja, kita menyesalkan sikap pemerintah yang bersikukuh mempertahankan PP Pengupahan. Dengan menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflansi dan pertumbuhan ekonomi, itu artinya pemerintahan Jokowi – JK anti demokrasi. Formula itu juga akan menjadikan upah riil buruh semakin rendah, karena kenaikan upah sudah di setting sedemikian rupa. Perlu diketahui, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap tahun, kenaikan upah mempertimbangkan hasil survey pasar terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga 60 jenis barang/jasa yang saat ini disebut Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Survey harga-harga ini dilakukan oleh Dewan Pengupahan, yang anggotanya terdiri dari perwakilan serikat buruh, apindo, pemerintah, dan akademisi. Selain KHL, hal lain yang akan diperhatikan adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, hingga kondisi pasar kerja. Sekarang, dengan adanya PP pengupahan, kenaikan upah secara otomatis hanya akan didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi mutlak ditentukan oleh Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Itu artinya, pemerintah menggunakan "tangan besi" dalam menetapkan besarnya upah. Padahal membahas kenaikan upah melalui dewan pengupahan merupakan sebentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak buruh. Pada saat yang sama, hal ini merupakan *control social* serikat buruh agar kenaikan upah benar-benar riil.

Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah.

Jika Pramono mengatakan PP Pengupahan memberikan kepastian. Pertanyaan kita, kepastian buat siapa? Bisa jadi, kepastian yang dimaksud adalah kendali penuh pemerintah untuk mengontrol upah. Jika sudah demikian, bagi buruh, itu justru menjadi misteri."[2]

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan ini telah dikaji ulang oleh beberapa serikat buruh yang ada di Indonesia. Hasilnya formulasi pengupahan yang ditetapkan pemerintah ini sudah sangat jauh dari standart kehidupan layak bagi kaum buruh. Hal inilah yang membuat terjadinya penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang pengupahan yang dilakukan oleh serikat buruh yang ada di Indonesia. Selain masalah formulasi pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 78 masyarakat industri dihadapkan masalah naiknya iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

[2] http://fspmi.or.id/istana-tegaskan-tak-akan-cabut-pp-pengupahan-buruh-kami-akan-terus-melawan.html. Di akses pada tanggal 28 Desember 2015, Jam 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan. Seperti yang diberitakan oleh media cetak Koran Perjuangan suara kaum buruh. (KP, 14/11/2015)

> "Jakarta,KSPI – Koordinator Departemen Informasi dan Komunikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Roni Febrianto mengatakan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran peserta mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum perlu dilakukan.
>
> "Untuk menutup defisit anggaran biaya operasional, pemerintah seharusnya menaikkan iuran penerima bantuan iuran (PBI). Kenaikan iuran peserta mandiri kelas I, II dan III belum perlu dilakukan," kata Roni Febrianto melalui siaran pers diterima di Jakarta, Rabu.
>
> Roni mengatakan iuran PBI yang ditanggung pemerintah Rp19.225 sangat tidak layak. Nilai iuran PBI yang kecil tersebut menyebabkan iuran yang terkumpul lebih kecil dari biaya operasional sehingga menyebabkan BPJS Kesehatan defisit hingga Rp5,5 triliun.
>
> Karena itu, Roni mendesak iuran PBI pada 2016 bisa dinaikkan menjadi Rp27.000 dan selanjutnya naik sesuai dengan inflasi sehingga pada 2019 iuran PBI berada pada kisaran Rp32.500.
>
> "Angka tersebut masih jauh dari lima persen alokasi anggaran kesehatan pada APBN sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," tuturnya.
>
> Roni mengatakan pemerintah harus lebih peduli pada kesehatan masyarakat dengan mendesak perbaikan kinerja BPJS Kesehatan terlebih dahulu daripada menaikan iuran peserta mandiri.
>
> Menurut Roni, kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan pada kisaran Rp5.000 hingga Rp20.000 pada awal tahun akan memberatkan masyarakat karena pemerintah sudah menaikkan tarif dasar listrik pada akhir Desember 2015.
>
> "Kesehatan merupakan hak rakyat. Jangan dijadikan ajang bisnis. Kesehatan harus dijadikan alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas," katanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Selain itu, Roni juga mendesak BPJS Kesehatan untuk menerbitkan laporan keuangan kepada publik secara terbuka dan berkala setiap awal tahun melalui media-media nasional agar masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja BPJS Kesehatan."[3]

Karena pekerja di Indonesia ini menempati posisi dan peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Kesejahteraan kehidupan masih belum layak diterima oleh kalangan buruh. Belum lagi masalah hak-hak buruh yang belum diterima atau dirampas oleh penguasa. FSPMI ini menjadi fungsi kontrol dalam kawasan masyarakat industri. Membentuk gerakan buruh dalam suatu kelas proletariat.

Organisasi proletariat sebagai suatu kelas, dan yang berarti sebagai suatu partai politik ini akhirnya melengkapi basis untuk perjuangan kelas. Untuk mengulanginya kembali: setiap perjuangan kelas adalah perjuangan politik. Perjuangan kelas adalah perunding dan penyambung lidah antara dua kepentingan yang berlawanan, antara kepentingan pihak yang hendak mengawetkan dan yang hendak menjungkirbalikkan institusi-institusi dan hubungan kekuasaan yang ada. Pembentukan kelas sebagai kelompok-kelompok kepentingan yang disorganisasikan, antagonisme antara kelas penindas dan kelas yang tertindas, dan akibat dari perubahan revolusioner itu merupakan hukum perkembangan dari seluruh sejarah sampai sekarang. Suatu kelas yang tertindas adalah merupakan syarat adanya setiap masyarakat yang berdasarkan atas pertentangan kelas. Jadi, pembebasan kelas yang

[3] http://www.koranperdjoeangan.com/kspi-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-belum-perlu.html. Diakses pada tanggal 28 Desember, 2015, Jam 10.00 WIB

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertindas harus meliputi penciptaan suatu masyarakat batu. 'Sejarah dari seluruh masyarakat hingga sekarang adalah sejarah perjuangan kelas.[4]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk problematika kaum buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Berbek Industri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Apa saja peran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Berbek Industri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui problematika kaum buruh di daerah Berbek Industri yang diterima oleh FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia).
2. Mengetahui peran FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dalam menuntaskan problematika kaum buruh di Berbek Industri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat mensinergikan pemikiran civitas akademia dengan pemikiran buruh.

[4] Ralf. Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hal. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penelitian ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa bagaimana cara peneliti dan bagaimana cara menggunakan teori sebagai kacamata untuk melakukan penelitian.
3. Penelitian ini juga merupakan kesempatan bagi penulis untuk belajar mengaplikasikan teori-teori kerakyatan yang telah penulis dapatkan selama ini dibangku perkuliahan, khususnya prodi Sosiologi.

Hasil penelitian ini akan memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa mereka dapat mengaplikasikan keilmuannya dalam dunia nyata masyarakat industri.

E. Definisi Konseptual

Penjelasan konsep yang mendasari pengambilan judul di atas sebagai bahan penguat sekaligus spesifikasi mengenai penelitian yang akan dilakukan.

1. Peranan (Role)

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Pembedaan antar kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai arti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.[5]

2. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)

Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional, Representatif, Fungsional, Bebas, Terbuka, Transparan dan Bertanggung jawab. Organisasi ini juga berasaskan Pancasila.[6]

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah aman sentosa dan makmur; (terlepas dari segala macam gangguan);[7]

4. Buruh

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Dalam masyarakat borjuis, kaum buruh hanya dijadikan sarana untuk meningkatkan jumlah buruh yang ada. Sebaliknya, dalam masyarakat komunis, buruh yang ada merupakan sarana untuk memperkuat, memperkaya, dan menyejahterahkan kehidupan pekerja. Dengan demikian, dalam masyarakat borjuis, yang dahulu menentukan yang kini; namun dalam masyarakat komunis masa kini menentukan masa lalu. Dalam masyarakat borjuis, modal merupakan sesuatu yang tersendiri dan sifatnya individual, sedangkan kehidupan

---

[5] *Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1990, hal. 268

[6] *Draft AD/ART FSPMI*, Bandung: 2006, hal. 3

[7] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hal. 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota masyarakat saling bergantung dan kurang memiliki individualitas.[8]

F. Telaah Pustaka

a. Kajian Pustaka

1. Hakikat Serikat Pekerja

Menurut Henry Simamora Serikat Pekerja adalah sebuah organisasi yang berunding bagi karyawan tentang upah-upah, jam-jam kerja, dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya.[9]

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2000, Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[10] Artinya Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan mempunyai sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Serikat Pekerja merupakan suatu organisasi yang bukan hanya meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja/buruh. Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta

[8] C Wright Mills, *Kaum Marxis*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal.54
[9] Henry Simamora. *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Salemba Empat, 1999) Hal. 678
[10] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.[11]

2. Masyarakat dengan Kesejahteraan Positif

Isu yang paling sedemikian jauh memisahkan golongan kiri dan kanan pada tahun-tahun terakhir ini adalah isu mengenai Negara kesejahteraan, yang disanjung disatu sisi dan dicela di sisi lain. Apa yang kemudian menjadi "Negara kesejahteraan" (sebuah istilah yang belum dikenal luas hingga tahun 1960-an dan istilah yang sama sekali tidak disukai oleh William Beveridge, arsitek Negara kesejahteraan Inggris) memiliki sejarah keberhasilan dan kegagalan. Asal-usulnya berada jauh sekali dari idealisme kaum kiri—dan memang, sebagian dari alasan diciptakannya Negara kesejahteraan adalah untuk menghalau ancaman kaum sosialis. Kelompok-kelompok penguasa yang mendirikan system asuransi social dalam kekaisaran Jerman pada akhir abad kesembilan belas membenci perekonomian laissez-faire seperti mereka yang membenci sosialisme. Namun model Bismarck ditiru olehbanyak Negara. Beveridge mengunjungi Jerman di tahun1907 dengan maksud mempelajari model itu. Negara kesejahteraan seperti yang ada di Eropa sekarang dihasilkan dalam dan oleh peperangan, seperti halnya begitu banyak aspek kewarganegaraan nasional.

[11] *Ibid*. Hlm. 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

System yang diciptakan oleh Bismarck di Jerman biasanya dianggap sebagai bentuk klasik Negara kesejahteraan. Tetapi Negara kesejahteraan di Jerman selalu memiliki jaringan kompleks kelompok dan asosiasi sektor ketiga yang diandalkan oleh para penguasa dalam menerapkan kebijakan-kebijakan kesejahteraan. Tujuannya adalah untuk membantu para penguasa ini mencapai tujuan social mereka. Kelompok sector ketiga ini hamper memonopoli bidang-bidang seperti anak. Sector nirlaba ini meluas, bukan menyusut, saat Negara kesejahteraan mulai tumbuh. Negara kesejahteraan bervariasi, tergantung pada seberapa jauh mereka memasukkan atau mengandalkan sector ketiga itu. Di Belanda, misalnya, organisasi-organisasi nirlaba merupakan system utama untuk menyampaikan layanan social, sementara di Swedia nyaris tidak ada organisasi nirlaba yang digunakan untuk tujuan tersebuut. Di Belgia dan Austria, sama halnya dengan di Jerman, sekitar setengah dari layanan social diberikan oleh kelompok-kelompok nirlaba.

Ilmuwan politik Belanda, Kees van Kersbergen menyatakan bahwa “pemahaman utama dari perdebatan kontemporer [tentang Negara kesejahteraan] adalah bahwa menyamakan demokrasi social dengan Negara kesjahteraan merupakan sebuah kekeliruan. Ia mengkaji secara mendetail pengaruh demokrasi Kristen berkembang dari partai-partai Katolik yang berperanpenting dalam perang di Jerman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda, Austria, Perancis, dan Italia. Para aktivis serikat buruh katolik memandang sosialisme sebagai musuh dan berupaya menghancurkan dasar-dasar pemikiran sosialisme itu sendiri, dengan menekankan kodeterminasi dan rekonsiliasi kelas. Pandangan Ronald Reagan, yang diutarakannya pada tahun 1981, bahwa "kita telah membiarkan pemerintah mengambil segala sesuatu yang sebelumnya kita kerjakan secara sukarela" merupakan gaung dari apa yang telah ada jauh sebelumnya dalam tradis Katolik di Eropa. Gereja, keluarga, dan teman adalah sumber utama solidaritas social. Negara turun tangan hanya ketika institusi-institusi itu tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.

Dengan adanya sejarah Negara kesejahteraan yang problematis tersebut, politik jalan ketiga perlu menerima beberapa kritik yang dikemukakan oleh kelompok kanan mengenai Negara itu. Negara kesejahteraan yang bergantung pada distribusi tunjangan dari atas ke bawah adalah tidak demokratis. Motifnya adalah perlindungan dan kepedulian, tetapi hal itu tidak memberi cukup ruang bagi kebebasan personal. Beberapa bentuk institusi kesejahteraan bersifat birokratis, mengasingkan, dan inefesien, dan tunjangan-tunjangan kesejahteraan bias menimbulkan konsekuensi-konsekuensi buruk yang merusak segala apa yang telah mereka rancang dan ingin raih sebelumnya. Bagaimanapun juga, politik jalan ketiga melihat masalah-masalah ini bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sinyal untuk melucuti kesejahteraan, melainkan sebagai sebagian alasan untuk merekonstruksikannya.

Masalah Negara dengan kesejahteraan hanya sebagian yang bersifat finansial. Dalam kebanyakan masyarakat Barat, pengeluaran proporsional pada system kesejahteraan tetap stabil selama sepuluh tahun terakhir. Di wilayah kerajaan Inggris, bagian GDP (gross domestic product) yang digunakan untuk Negara kesejahteraan meningkat secara konstan sampai akhir 1970-an. Sejak itu ia stabil, meskipun angka-angka kotornya menunjukkan perubahan dalam distribusi pengeluaran dan sumber-sumber pendapatan. Kelenturan anggaran kesejahteraan di Kerajaan Inggris dinilai baik sekali, terutama dengan adanya tekad pemerintah Margaret Thatcher untuk memotong anggaran tersebut.

Pengeluaran untuk pendidikan dalam prosentase GDP turun dari 6,7 persen menjadi 5,2 persen antara tahun 1975 dan 1995. Tetapi pengeluaran untuk layanan kesehatan meningkat selama periode ini. Di tahun 1975 pengeluaran tersebut ekuivalen dengan 3,8 persen GDP. Menjelang 1995 meningkat sampai 5,7 persen (presentase yang lebih rendah daripada di sebagian Negara industrial lainnya). Perumahan umum mengalami pemangkasan terbesar, menurun dari 4,2 persen GDP di tahun 1975 menjadi 2,1 persen dua puluh tahun kemudian. Seperti yang terjadi di tempat-tempat lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengeluaran untuk jaminan social mengalami peningkatan paling tinggi. Di tahun 1973-1974, angkanya mencapai 8,2 persen GDP, dan mencapai 11,4 persen di tahun 1995-1996. Pengeluaran untuk jaminan social meningkat dari 100 persen selama periode tersebut. Factor utama yang mendasari peningkatan ini adalah tingkat pengangguran yang sangat tinggi, pertumbuhan jumlah kaum miskin, dan perubahan-perubahan dalam pola-pola demografis, terutama peningkatan jumlah orang tua tunggal dan lanjut usia.

Perkembangan-perkembangan yang serupa telah mempengaruhi semua system kesejahteraan, karena perkembangan itu terikat dengan perubahan-perubahan structural yang mendalam. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai masalah yang mendasar bagi Negara kesejahteraan yang lebih komprehensif, seperti Negara-negara Skandinavia. Egalitarisme orang-orang Skandinavia memiliki akar historis dan kultural, dan bukan hanya merupakan produk Negara kesejahteraan universalis. Public yang menerima tingkat perpajakan tinggi di Negara-negara Skandinavia lebih luas dibandingkan di sebagian besar Negara Barat. Tetapi system tunjangan tertekan ketika pengangguran meningkat, seperti yang terjadi di Finlandia—meskipun Negara-negara Skandinavia mempelopori kebijakan-kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Mengingat ukurannya yang relative kecil, Negara kesejahteraan Skandinavia merupakan Negara yang banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi kerja, khususnya bagi para wanita. Tetapi akibatnya, segregasi jenis kelamin dalam pekerjaan lebih tinggi daripada sebagian besar Negara industrial lainnya.[12]

Negara kesejahteraan, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, lebih merupakan pengumpulan resiko daripada sumber daya. Yang membentuk solidaritas kebijakan social adalah "kelompok-kelompok yang memiliki privilese melihat bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama dengan mereka yang lemah dalam perelokasian resiko". Tetapi, Negara kesejahteraan tidak dipersiapkan untuk menangani resiko-resiko gaya baru seperti resiko resiko perubahan teknologi, eksklusi social, atau akselerasi proporsi rumah tangga dengan orang tua tunggal. Ketidaksesuaian ini terdiri dari dua jenis; pertama resiko-resiko yang dilindungi itu tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan, dan kedua, kelompok-kelompok yang seharusnya tidak dilindungi justru diperlakukan sebaliknya.

Reformasi kesejahteraan harus mengenali pokok-pokok resiko yang telah dibicarakan sebelumnya: pengelolaan resiko yang efektif (individual atau kolektif) tidak semata-mata berarti pengurangan resiko atau perlindungan dari resiko; hal itu juga berarti pengendalian sisi resiko yang positif serta penyediaan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil resiko. Pengembalian resiko secara aktif

[12] Anthony Giddens, The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 128-132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang sebagai sifat inheren aktivitas kewirausahaan, tetatpi hal yang sama juga berlaku bagi angkatan kerja. Memutuskan untuk bekerja dan melepaskan tunjangan-tunjangan, atau menerima pekerjaan dalam sebuah industry khusus, merupakan aktivitas penuh resiko—tetapi pengambilan resiko seperti itu sering kali menguntungkan individu tersebut maupun masyarakat yang lebih luas.[13]

b. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pertama, skripsi yang berjudul "Buruh dan Politik: Studi tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (K.KASBI) Dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013" yang dilakukan oleh Umar Algifari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik UIN Syarf Hidayatulloh Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif yang menghasilkan temuan-temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengkuran. Gerakan serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terjadi itu timbul karena adanya sebuah kebijakan yang dianggap merugikan bagi pekerja atau buruh, dan kenyataan ekonomi politik yang tidak berpihak dengan kepentingan pekerja/buruh. Kondisi ini akan terus menimbulkan perlawanan dari serikat pekerja atau serikat buruh hingga tuntutannya dapat dipenuhi. Gerakan serikat pekerja di

[13] Anthony Giddens, The Third Way: Jalan Ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia tidak hanya sebatas menghendaki terjadinya perubahan antara pekerja/buruh dengan pengusaha semata, melainkan perubahan pada sistem ekonomi politik yang berpihak pada pekerja atau buruh.

Sulitnya posisi serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan kesejahteraannya tidak hanya disebabkan faktor internal sebuah perusahaan saja, akan tetapi adanya sistem yang menyebabkan kondisi penindasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui undang-undang ketenagakerjaan. Seperti yang dialami pekerja/buruh saat ini terkait sebuah sistem yang mengizinkan perusahaan menyerahkan proses produksi kepada sebuah jasa yang menyalurkan tenaga kerja, sistem ini dikenal dengan sistem outsourcing (alih daya). Tidak hanya itu, upah juga menjadi masalah sakral yang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Pemerintah, pengusaha, buruh tidak pernah seirama dalam membicarakan upah. Dua kasus ini yang sampai saat ini menjadi PR bagi serikat buruh.

Dewasa ini organisasi buruh yang muncul merupakan indikator sebuah perubahan yang sangat besar dalam gerakan buruh. Gerakan buruh semakin berkembang saat ini dan semakin bersikap reaktif dalam melakukan perlawanan memperjuangkan kesejahteraan mereka walaupun hasil yang didapat belum tentu memberikan perubahan yang signifikan bagi pekerja/buruh secara keseluruhan. Dalam hal ini KSPSI dan K.KASBI adalah salah satu organisasi buruh yang selalu berusaha untuk membangun gerakan buruh yang mandiri, kuat, dan berkarakter demi terciptanya kesejahteraan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buruh secarra keseluruhan. Adapun catatan penting dalam sejarah perjalanan KSPSI danK.KASBI dalam menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 dapat dilihat melalui:

KSPSI mempunyai peran dalam menuntut agar sistem outsourcing dapat dihapuskan dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 melalui cara-cara yang sifatnya ilmiah seperti, meliputi diskusi, seminar, diplomasi terhadap pemerintah dan pengusaha agar tuntutan dari KSPSI dapat direalisasikan, pengawasan terhadap perusahaan terkait sistem outsourcing dan upah pekerja, tunjangan kemahalan atas kenaikan BBM. Diskusi, seminar dan diplomasi adalah langkah yang dilakukan KSPSI dalam memperjuangkan tuntutan pekerja agar mendapatkan kesejahteraannya. Cara-cara ini diharapkan agar hubungan tripatrit dapat dijalin dengan situasi kondusif sehingga tuntutan pekerja dapat didengarkan dan direalisasikan.

Salah satu yang dihasilkan KSPSI melalui diplomasi diplomasi dengan tripatrit adalah terkait solusi menghadapi harga bahan pokok yang naik sehingga menghasilkan solusi dengan diberikannya kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak sebesar Rp 2000-3000 per harinya, itu semua dilakukan dengan duduk bareng, berdiskusi, mendengarkan keluh kesah bersama dengan memecahkan masalah pekerja dengan pengusaha. Pengawasan terhadapa perusahaan agar tidak melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah bentuk konkrit yang dilakukan KSPSI terkait sistem outsourcing dan upah pekerja. Mengingat pengawasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hal penting dalam menjalankan perjuangan serikat pekerja. Sementara yang dilakukan K.KASBI dalam menuntut agar sistem outsourcing segera dihapuskan dan UMP DKI Jakarta 2013 dinaikkan dapat dilihat sebagai berikut, menggagas konsep dan aksi demonstrasi. Langkah awal yang dilakukan K.KASBI dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan buruh adalah dengan menggagas konsep untuk kemudian diberikan kepada pemerintah, diantara gagasan atau konsep yang dilakukan K.KASBI adalah: hapus sistem kerja outsourcing, upah layak bagi kaum buruh, jaminan sosial buka asuransi sosial, subsidi untuk rakyat, STOP privatisasi dan Nasionalisasi semua aset-aset strategis, STOP Uion Busting dan kriminalisasi aktiivis buruh, turunkan harga BBM dan sembako, bangun Industri yang kuat untuk mensejahterhkan rakyat, tanah untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan gratis dan berkualitas untuk seluruh rakyat.

Itulah konsep yang digagas K.KASBI kepada pemerintah agar pemerintah sadar bahwa saat ini kondisi buruh mengalami ketidakadilan dalam bekerja. Apabila konsep tidak didengarkan maka aksi demonstrai merupakan langkah yang dilakukan K.KASBI. KSPSI dan K.KASBI merupakan organisasi pekerja/buruh yang sama-sama memperjuangkan kepentingan dari pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh dapat hidup sejahtera. Pada perjuangan menuntut penghapusan sistem outsourcing dan kenaikan UMP DKI Jakarta 2013 mempunyai peranan perjuangan yang berbeda. Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan karena garis besar haluan organisasi yang berbeda-beda dan strategi geraknya berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Refina Hadi Nurjanah (2015), mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul "Peranan Serikat Pekerja dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pancasila (Studi Deskriptif di Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Indonakano, Bekasi, Jawa Barat) Serikat Pekerja dalam hal ini PUK SPL FSPMI PT. Indonakano berperan penting dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT. Indonakano. Upaya yang dilakukan PUK SPL FSPMI PT. Indonakano adalah dengan mendampingi dan mewakili pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tingkat Bipatrit, Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase, sampai pada tingkat Pengadilan Hubungan Industrial hingga perselisihan hubungan industrial benar-benar terselesaikan. Faktor yang menyebabkan perselisihan hubungan industrial sering terjadi disebabkan karena perbedaan pelaksanaan yaitu pihak perusahaan hanya melaksanakan sebagian normatif atau bahkan tidak menjalankan hal-hal yang bersifat normatif. Kedua, karena perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerja atau adanya diskriminasi kepada pekerja. Ketiga, karena perbedaan penafsiran hal inilah yang paling sulit karena perbedaan pemahaman antara pekerja dengan pengusaha. Serikat Pekerja mengutamakan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan lebih mengedepankan perundingan Bipatrit karena penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling baik adalah mencapai kesepakatan bersama antara pekerja dengan pengusaha. Hubungan Industrial Pancasila merupakan bentuk hubungan industrial yang paling cocok digunakan di Indonesia karena antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah hubungannya seimbang. Hubungan Industrial Pancasila selalu diupayakan hadir di seluruh perusahaan asing maupun lokal yang ada di Indonesia untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2004) Mahasiswi Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul "Aksi Buruh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) Cabang Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksi pemogokan buruh yang tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Masalah Irian Barat yang tidak memperoleh kesepakatan melalui forum KMB menjadikan serikat-serikat buruh untuk melakukan aksi pembebasan Irian Barat. Selain itu juga didorong oleh ketidakpuasan buruh terhadap upah yang diterima, kesewenang-wenangan majikan, dan semakin meluasnya monopoli asing di Indonesia dan aksi itu memuncak setelah tewasnya tujuh orang rakyat Indonesia di Irian Barat karena kekejaman Belanda. Aksi-aksi dilakukan melalui pemogokan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Aksi tersebut diikuti dengan mengambilalih semua aset-aset

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perusahaan-perusahaan Belanda. Akan tetapi aksi-aksi pemogokan buruh pada akhirnya dilarang oleh Penguasa Militer dengan alasan bahwa aksi-aksi buruh tersebut membuat kondisi Indonesia semakin kacau, khususnya pada perekonomian negara.dan disinyalir bahwa aksi tersebut di bawah pengaruh sayap kiri melalui serikat buruhnya yang direpresentasiakan oleh SOBSI. Aksi-aksi pemogokan oleh serikat buruh SOBSI Cabang Madiun pada akhirnya dibubarkan oleh militer dan semua perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih oleh buruh diambilalih penangannya oleh militer, karena di sinyalir bahwa aksi-aksi oleh serikat buruh SOBSI tersebut bukan murni semata, tetapi ada tujuan lain yaitu bahwa komunis di belakang itu semua Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa dengan adanya aksi pemogokan serikat buruh SOBSI, kehidupan perekonomian Madiun tidak begitu terpengaruh dan masyarakat tetap beraktifitas sebagaimana biasanya, tetapi aksi tersebut bagaimanapun juga menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Gerakan yang dilakukan oleh SOBSI melalui aksi pemogokan adalah bukan suatu gerakan yang direncanakan, tetapi terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor yang semakin memuncak, sehingga meledak dalam suatu bentuk aksi pemogokan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitihan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif karena, peneliti ingin menggambarkan realita dibalik fenomena secara mendalam dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci. Menurut Keirl dan Miller dalam Moleong yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan, manusia, kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya".

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrument kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan makna dari pada kesimpulan generalisasi. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, berfokus pada makan individual, dan menterjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Jenis penelitian baru-baru ini memiliki dua pendekatan kualitatif, yakni pengamatan melibat dan penelitian tindakan partisipatif.[14]

Strauss dan Corbin dalam buku *Basics of Qualitative Research* menyebutkan bahwa penelitian kulitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik.[15]

---

[14] Definisi mengenai penelitian kualitatif ini diambil dari makalah: Dr Rr. Suhartini, Dra., M.Si berjudul: *Bahan Perkuliahan Metode Penelitian Kualitatif*, yang disampaikan di kelas pada 25 Maret 2014

[15] Prosedur penelitian kualitatif terletak pada analisa non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berada di kawasan Berbek Industri Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Dengan berdirinya posko pengaduan kaum buruh ini dianggap masih banyaknya kontradiksi antara pihak perusahaan dengan pihak buruh.

Waktu penelitian di lakukan mulai bulan Oktober 2015 sampai bulan Januari 2015. Adapun alasan penelitian yang menjadikan Berbek Industri ini di jadikan objek penelitian ialah, karena dari hasil pengamatan yang di lakukan peneliti tentang peran serikat buruh dalam menangani kasus-kasus buruh yang belum terselesaikan.

3. Pemilihan Subyek Penelitihan

Sasaran penelitian yang akan dilakukan adalah posko FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia kawasan Berbek Industri Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.1

Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Agus Supriyanto	Buruh PLN Sidoarjo	Ketua FSPMI Cabang Sidoarjo
2	Doni Arianto	Buruh Pabrik Berbek Industri	Ketua FSPMI Cabang Surabaya
3	Trio Hardian	Buruh Pabrik Percetakan Berbek Industri	Anggota FSPMI
4	M. Saroni	Buruh Pabrik	Bukan Anggota FSPMI

dokumen, buku, kaset vidio, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Lihat Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research; Grounded Theory Procedures and Techniques*, Penj. Muhammad Shodiq & Imam Muttaqien, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Plastik Berbek Industri	
5	Imron Salim	Bururh Pabrik Keramik Karang Pilang	Anggota SPSI
6	Yusup Pono	Satpam Pabrik Cat Berbek Industri	Karyawan Outsourcing

Sumber: Snowball Sampling, pengambilan sampel sumber data yang diawali dengan beberapa informan kemudian mendapatkan referensi dari informan sebelumnya untuk informan selanjutnya.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang peran FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial kaum buruh Berbek Industri di Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diperlukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Melakukan diskusi intensif

Langkah ini adalah langkah pertama yang akan dilakukan pra-penelitian. Diskusi secara intensif yang dilakukan di kelas dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat dan gagasan mengenai cara-cara yang tepat dalam melakukan penelitian. Langkah ini penting supaya semua yang terlibat dalam penelitian mempunyai pengetahuan dan orientasi yang jelas ketika terjun di lokasi penelitian.

b. Melihat Fenomena

Melihat semakin ramainya posko FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dan banyaknya problematika kaum buruh di kawasan Berbek Industri. Langkah ini mempunyai tujuan untuk membuktikan dan menarik hipotesa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai objek penelitian peran FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial kaum buruh Berbek Industri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo.

c. Melakukan penulisan proposal

Langkah selanjutnya adalah menulis proposal penelitian. Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang rencana kegiatan penelitian di kawasan Berbek Industri, Desa Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo secara lengkap, jelas, singkat, dan mudah dimengerti sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang memberikan persetujuan atas kegiatan penelitian yang diusulkan.

d. Melakukan Penelitian

Langkah ini merupakan inti dari kegiatan penelitian yang akan dilakukan, yang bertujuan untuk mencari, memperoleh dan menganalisa data yang telah diperoleh dari terjun lapangan untuk penelitian.

e. Melakukan Penulisan Laporan

Setelah memperoleh dan menganalisa data yang didapat dari penelitian lapangan, pada langkah ini dilakukan penulisan laporan secara deskriptif-interpretatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian tentang opini mahasiswa terhadap plagiarisme ini, data dari subyek penelitian dikumpulkan melalui :

1. Observasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi yang dilakukan peneliti adalah pada saat penentuan informan dimana peneliti mengamati secara visual menggunakan indera mata dan telinga sendiri untuk mengetahui problematika kaum buruh Berbek Industri yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi mengenai apa saja peran FSPMI dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial kaum buruh di Berbek Industri.

2. Wawancara

Proses menggali data terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka dan disertai dengan wawancara lebih mendalam terhadap informa*n (indepth interview)*. Wawancara yang dilakukan lebih menyerupai suatu dialog antara peneliti dan subyek penelitian yang dilakukan dengan suasana keakraban dan santai dengan menggunakan pedoman wawancara atau guide interview. Dimana, dalam proses wawancara peneliti menyesuaikan lokasi wawancara sesuai keinginan informan. Dengan cara ini dapat menggali sebanyak mungkin informasi sehingga memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya dan lebih memungkinkan mendapatkan info yang unik dan jujur. Dalam proses wawancara peneliti tidak terpaku pada pedoman wawancara yang baku tetapi juga mengikuti alur pembicaraan subyek penelitian dan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan. Pada saat melakukan percakapan, peneliti berusaha untuk memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebebasan kepada informan apapun pendapatnya dan tidak untuk memotong atau menyela perkataan informan. Untuk memudahkan proses wawancara peneliti menggunakan media handphone dan kamera digital sebagai media untuk merekam hasil wawancara serta mengabadikan suatu realitas yang terjadi di lapangan sehingga hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan.

3. Studi pustaka atau literatur, menggunakan buku-buku atau artikel dalam kaitannya dengan kajian teoritik yang dapat menjelaskan tentang peran Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dalam mewujudkan kesejahteraan kaum buruh Berbek Industri.

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap analisis data terdapat tiga langkah untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan (Salim, 2006: 22-23), yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi.
2. Penyajian data (*data display*) yaitu deskripsi dalam bentuk teks naratif berdasarkan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), mencari makna dari setiap gejala yang diperolehnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dan proposisi. Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi yang valid dan kokoh.

Dengan tiga langkah analisis data tersebut memudahkan peneliti untuk menganalisis data dari informan. Peneliti juga menggunakan kategorisasi untuk mengklasifikasikan data-data kunci sehingga bisa lebih mudah untuk menarik kesimpulan hasil penelitian. Kategorisasi data yang tersebut dalam bentuk tabel dimana jawaban informan di kategorikan menurut konsep-konsep penelitian yang terpenting. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori konflik kelas Karl Marx.

7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam proses penelitian tidak semua pernyataan atau informasi yang didapatkan dari informan itu sesuai atau valid. Maka dari itu uraian Informasi, tindakan dan ungkapan yang didapat perlu terlebih dahulu diukur keabsahan datanya. Proses ini sangat penting dimaksudkan agar informasi yang diperoleh memiliki derajat ketepatan dan kepercayaan sehingga hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan. Agar data yang diperoleh benar-benar valid maka informasi yang telah diperoleh dari satu informan dicoba untuk ditanyakan kembali kepada informan yang lain dalam beberapa kesempatan dan waktu yang berbeda. Proses ini mengikuti apa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikemukakan oleh Moleong yaitu teknik member check (pengecekan anggota). Dengan kata lain peneliti melakukan cross check mempertanyakan pertanyaan yang sama dengan informan yang berbeda hingga informasi yang diperoleh menjadi sama atau memiliki kemiripan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilaporkan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, definisi konsep dan sistematika pembahasan

BAB II : KERANGKA TEORITIK

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Menjelaskan tentang deskripsi umum obyek penelitian dan juga berisi tentang deskripsi hasil penelitian. Menjelaskan temuan data dan juga konfirmasi temuan dengan teori

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id